



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

20 24



DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BNN dalam mendukung pencapaian visi misi BNN merupakan penggerak utama dalam menghantarkan cita-cita di penghujung Kabinet Indonesia Maju menjadi negara yang maju terus dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan mandiri serta bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

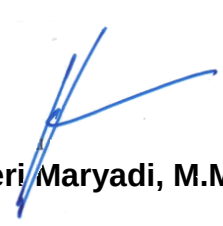
Melanjutkan semangatnya, sebagai langkah awal memasuki kabinet Merah Putih dengan program yang berdampak luas ke masyarakat sesuai karakteristik wilayah hingga pesisir dan perbatasan dengan sentuhan tematik dan ikonik menjadikan semakin tanggapnya masyarakat terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban upaya yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh, khususny dalam kaitan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta berkinerja tinggi maka dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung pencapaian target Renstra Deputi Bidang Dayamas 2020-2024 serta berkontribusi pada target Nasional BNN sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

#Ajak-ajak masyarakat produktif dan mandiri

#Salam sehat tanpa narkoba

Jakarta, Januari 2025
Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN


Drs. Heri Maryadi, M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dipenghujung periode Nawacita kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengamanatkan pengejawantahan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan capaian jumlah kab/kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun 2024 sebesar 170 kab/kota (113.33%) dari 173 kab/kota vertikal BNN yang terdiri dari 59 kab/kota (13.29%) berkategori sangat tanggap dengan nilai Indeks 3,25-3,91 (skala 4) dan 111 kab/kota (64.16%) berkategori Tanggap dengan nilai Indeks 2.65-3.24 (skala 4). IKOTAN Nasional dengan nilai indeks 3.11 (skala 4) atau 77.67 (skala 100) masuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B.

Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif tahun 2024 yang telah ditetapkan berjumlah 44 kawasan dan berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 didapatkan bahwa realisasi kawasan yang berhasil dibina sebanyak 76 kawasan yang pulih. Capaian Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang 18 Pokmas (112,50%) dari target 16 Pok Masy dan capaian Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika 64 kelompok masyarakat (228,57%) dari target 28 kelompok masyarakat

Penguatan sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas masyarakat dengan capaian advokasi kebijakan KOTAN sejumlah 414 lembaga (100%) yang tersebar pada lingkungan pendidikan 161 lembaga (39%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.54, lingkungan pemerintah 132 lembaga (32%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.58, lingkungan masyarakat 107 lembaga (26%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.55, dan lingkungan swasta 14 lembaga (3%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.91 yang secara kumulatif diperoleh IKP Nasional 3.59 dalam kategori A (sangat mandiri) tentunya tidak lepas dari partisipasi kemandirian Penggiat P4GN yang ada di tiap-tiap lingkungan.

Realisasi anggaran ke deputian pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.10.499.547.281,-(97.30%) dari PAGU Rp.10.790.593.000, Jika dibanding dengan T.A 2023 telah diserap sebesar Rp 61.895.515.000,-(98,64%) maka terjadi penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 1.34%, hal ini dikarenakan adanya perintah Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk efisiensi anggaran perjalanan dinas Triwulan IV tahun 2024 sebesar 50% (Rp.261.023.000,-) di setiap Kementerian/Lembaga, dari Direktorat Peran Serta Masyarakat diblokir sebesar Rp.130.511.000,- dan dari Direktorat Pemberdayaan Alternatif sebesar Rp.130.512.000,-.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menanggulangi bahaya Narkoba, sebagaimana diketahui bersama bahwa tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk bergerak secara mandiri dan berkelanjutan melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karenanya, tugas dan fungsi Bidang Dayamas yang diemban merupakan inti dari P4GN dan garda terdepan bangsa dalam memacu peran serta aktif masyarakat dalam P4GN.

Sebagai pengemban amanah memberdayakan masyarakat anti narkoba, Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberikan tugas meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Tugas ini dibagi kepada Direktorat Peran Serta Masyarakat untuk membentengi lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan kepada Direktorat Pemberdayaan Alternatif untuk melakukan intervensi P4GN pada kawasan rawan dan rentan narkoba.

Berkaitan hal-hal di atas, sebagai upaya membangun kinerja positif yang telah melaksanakan tugas yang diembannya yaitu menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk melakukan upaya P4GN, sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disampaikan dalam bentuk capaian kinerja selama tahun 2024 yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS POKOK FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok

Melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif.
 - b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

 - 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
 - 6) Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan

- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Badan Narkotika Nasional.

Visi Badan Narkotika Nasional sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni “Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

1. Tujuan

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, indikator kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang dikelola Kedeputian pemberdayaan Masyarakat BNN di Tahun 2024;

- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat BNN pada tahun 2024, untuk kemudian diharapkan mendapat masukan dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan langkah-langkah strategis Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat yang akan datang.

2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki rencana strategis yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan

indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba". Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah kondisi ketanggapsiagaan suatu kota/kabupaten dalam melakukan penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancaman bagi para pemangku kepentingan di Kab/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan berbagai program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigasi di wilayah Kab/Kota.

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual daerah dengan instrumen ukur ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap ancaman narkoba yang terdiri dari aspek ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Indikator Kinerja Utama tersebut diturunkan secara berjenjang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada 2 (dua) Direktorat.

Rencana strategis pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu meningkatnya kesadaran & kepedulian masyarakat terhadap P4GN dengan indikator indeks kemandirian partisipasi. Rencana strategis pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Status eKeterpulihan Kawasan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (2024)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Penetapan Kinerja yang dibuat setiap tahun oleh satuan kerja suatu Lembaga. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan kinerja pada Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja yaitu jumlah kabupaten/kota berkategori “tanggap ancaman narkoba” yang memiliki target Tahun 2024 yaitu sejumlah 150 Kab/Kota.

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota berkategori “tanggap ancaman narkoba”	150 Kab/Kota

Adapun Penetapan Kinerja pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN. Target Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2024 yaitu 3,3 berkategori Mandiri.

Tabel 2.2. Target Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya/ Waspada	44 Kawasan

	narkoba secara berkelanjutan	menjadi Waspada/Siaga/ Aman	
--	------------------------------	-----------------------------	--

Penetapan Kinerja pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja status keterpulihan kawasan rawan narkoba dari bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/aman yang memiliki target tahun 2024 yaitu sejumlah 44 kawasan.

Tabel 2.3. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,3 Indeks (kategori Mandiri)

C. PERJANJIAN KINERJA DAYAMAS TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024 memiliki sasaran program yaitu Meningkatkan Ketanggapsiagaan Masyarakat terhadap Ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba dan dengan target kinerja sejumlah 150 Kabupaten/Kota.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota berkategori “tanggap ancaman narkoba”	150 Kabupaten /Kota

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat T.A. 2024 memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, dengan indikator kinerja berupa Indeks Kemandirian Partisipasi, dan dengan target kinerja sebesar 3,3.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya/ Waspada menjadi Waspada/Siaga/ Aman	44 Kawasan

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A. 2024 memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan, dengan indikator kinerja berupa Status

Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya menjadi Waspada dan dengan target kinerja sejumlah 44 kawasan.

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,3 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

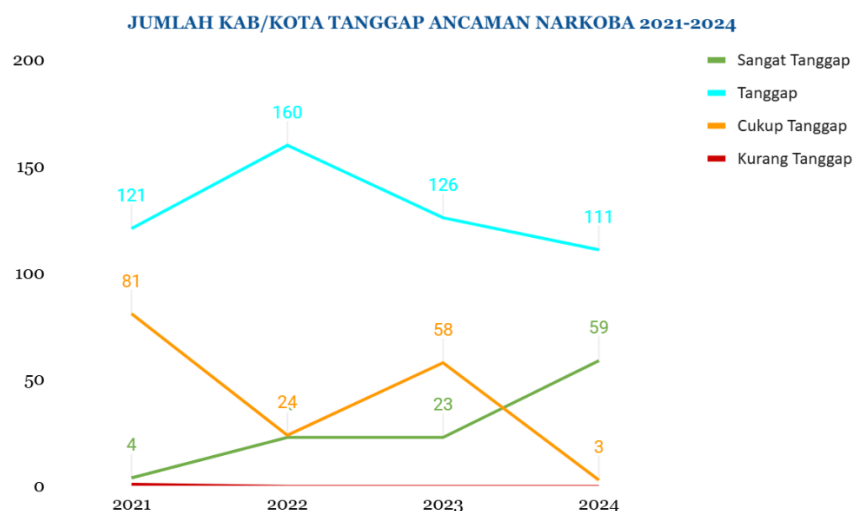
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting pencapaian target pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, di mana RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia kedepan yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita ke-dua di tahun 2024.

A. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah Nasional (Tahun 2021-2024) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Capaian KOTAN Tahun 2021-2024

Tahun 2021-2024 jumlah kab/kota tanggap ancaman narkoba menunjukkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas secara drastis dengan prosentase 93.22% untuk kategori sangat tanggap dan untuk kategori tanggap cukup dinamis, sedangkan untuk kategori cukup tanggap mengalami penurunan yang sangat tajam (96.30%).

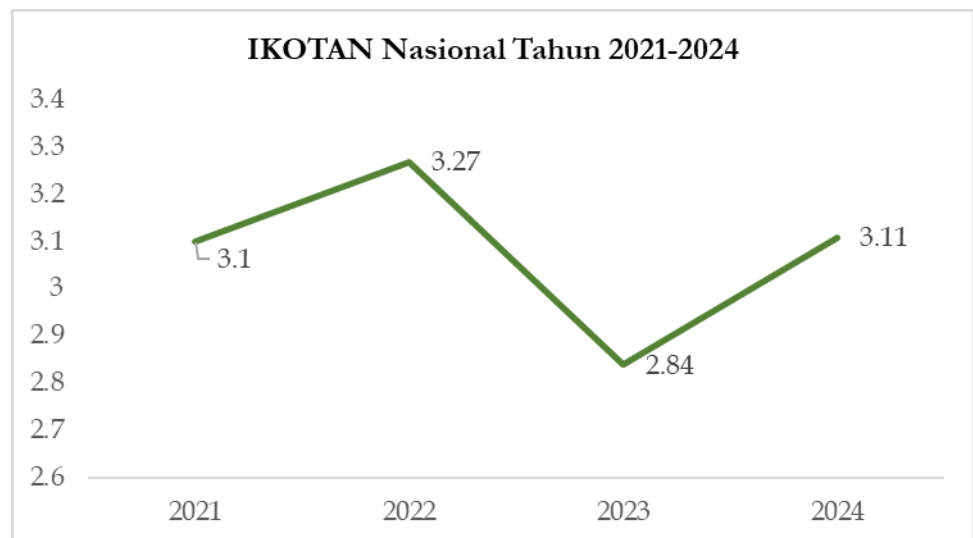
Grafik 3.1. Capaian Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba 2021-2024



Artinya, kab/kota tanggap ancaman narkoba kategori sangat tanggap telah memahami strategi terpadu dalam meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat yang fokus utamanya meningkatkan ketahanan masyarakat melalui penguatan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum melalui pengembangan kapasitas bagi Penggiat P4GN yang menjadi perpanjangan tangan BNN di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan dan telah mengenali semua potensinya dan telah ada antisipasinya untuk menciptakan lingkungan yang tanggap terhadap ancaman narkoba di wilayahnya masing-masing. Disamping itu, mampu menunjukkan potensi ketanggapan yang sangat baik, memahami dan menemuknenali seluruh aspek dan potensi wilayahnya dan telah mengetahui cara mengantisipasi dan memitigasi ancaman dari luar.

Capaian IKoTAN nasional tahun 2024 mengalami peningkatan 9.5% dan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berselang (2021-2024) mengalami kondisi dinamika fluktuatif dengan nilai prosentase kumulatif 0.32%.

Grafik 3.2. Capaian Indeks Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba 2021-2024



B. Capaian Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2021-2024

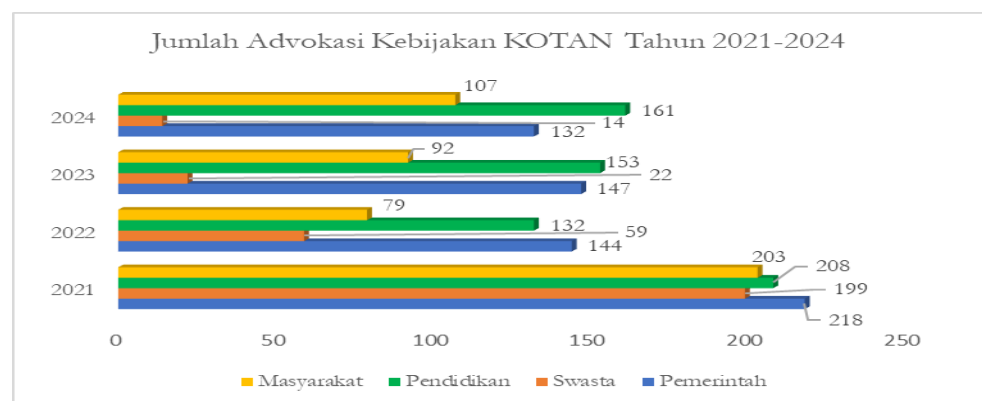
Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lingkungan masyarakat secara kuantitas mengalami penurunan yang sangat signifikan (61.08%) tahun 2021-2022 akibat terdampak *covid-19* dan terjadi peningkatan (35.44%) tahun 2022-2024 yang dalam peralihan *new normal* tentunya juga berpengaruh pada dinamika sosial masyarakat.

Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lingkungan pendidikan tahun 2021-2022 terjadi penurunan cukup curam (36.5%) karena terdampak *covid-19* dan tahun 2022-2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 21.97%. Proses pembelajaran jarak jauh, adaptasi kebiasaan baru dan peralihan kurikulum merdeka hanya menjadi *euphoria civitas akademik* merupakan faktor kunci dalam dinamika capaian advokasi kebijakan KOTAN di lingkungan pendidikan.

Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lembaga swasta dalam kurun 4 (empat) tahun mengalami penurunan sangat curam secara kumulatif (92.96%), dimana tahun 2021-2022(70.4%), 2022-2023(62.7%), dan 2023-2024 (57.14%) akibat kebijakan fiskal dalam negeri.

Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lembaga pemerintah sangat fluktuatif dimana mengalami penurunan 33,9%(2021-2022) namun mengalami peningkatan 2,1% (2022-2023) dan terjadi penurunan 11,36% (2023-2024).

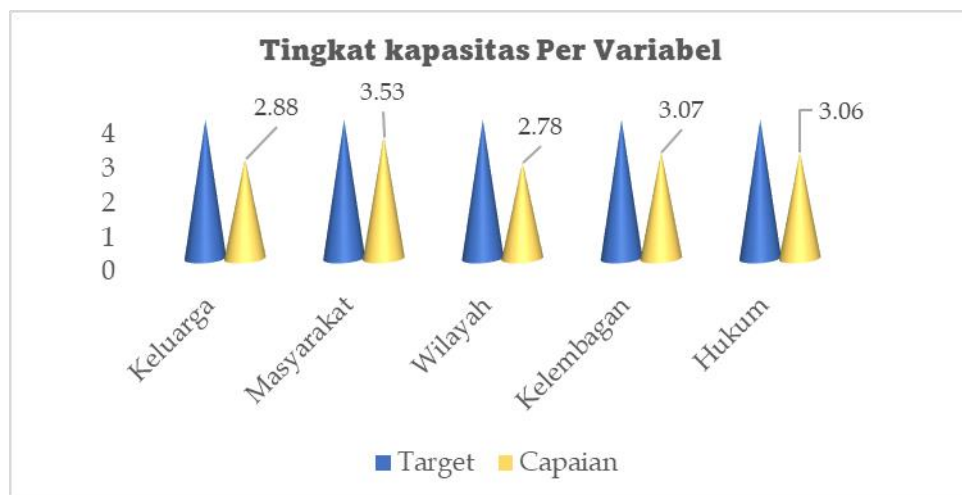
Grafik 3.3. Jumlah Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2021-2024



Variabel Kewilayahan merupakan variabel dengan nilai paling rendah,

yaitu 2.78 (skala 4) sedangkan variabel Ketahanan Masyarakat merupakan variabel dengan nilai paling tinggi, yaitu sebesar 3.53 (skala 4) karena bobot variabel kewilayahan adalah 10, yang merupakan bobot paling kecil dibandingkan dengan variabel lain. Walaupun demikian, analisis uji multivariat menunjukkan bahwa variabel kewilayahan memiliki nilai Odds Ratio (OR) tertinggi, yaitu sebesar 84,787 yang menunjukkan bahwa variabel kewilayahan memberikan pengaruh paling signifikan terhadap ketanggapan dibandingkan variabel lainnya. Artinya, meskipun kontribusi absolut variabel kewilayahan kecil namun pengaruhnya secara proporsional terhadap ketanggapan sangat besar.

Grafik 3.4. Tingkat kapasitasPer Variabel Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba 2021-2024



1. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan
Direktorat Pemberdayaan Alternatif

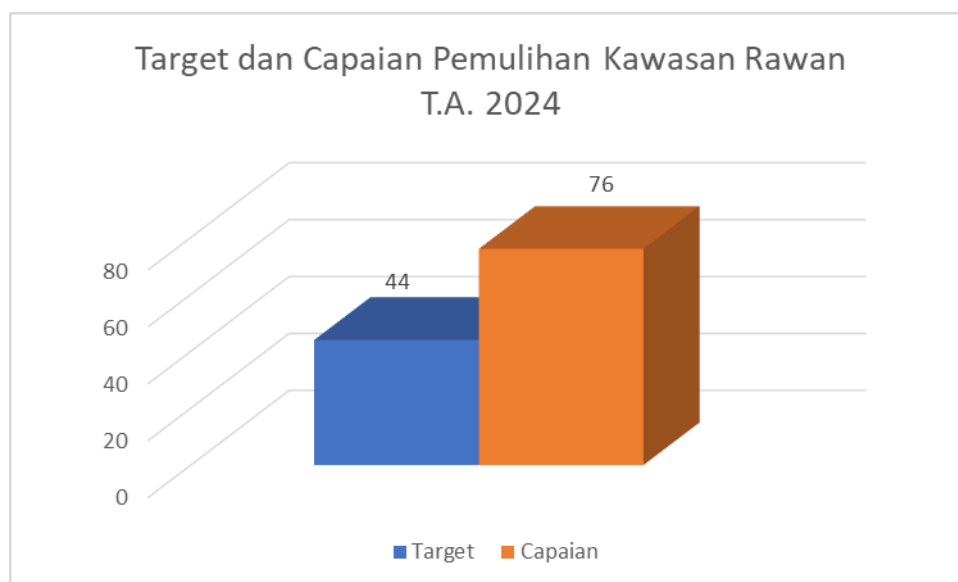
a. Capaian Kinerja Kegiatan

Target Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif tahun 2024 yang telah ditetapkan berjumlah 44 kawasan dan berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 didapatkan bahwa realisasi kawasan yang berhasil dibina sebanyak 76 kawasan yang pulih.

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A 2024

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya/ Waspada menjadi Waspada/Siaga/ Aman	44 Kawasan	76 Kawasan	172,73

Grafik 3.5. Target dan Capaian Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba T.A. 2024



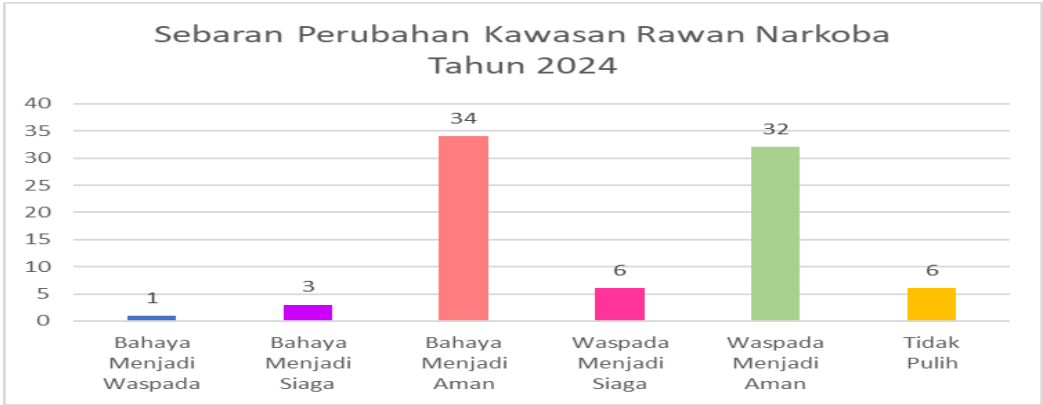
Status keterpulihan kawasan rawan narkoba merupakan hasil pengukuran keterpulihan kawasan rawan narkoba. Suatu kawasan dikatakan pulih bila kawasan tersebut sehat kembali setelah dilakukan

intervensi program pemulihan. Intervensi program pemulihan tersebut melalui program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) mulai dari Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan dan Kerja Sama.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kawasan rawan narkoba berdasarkan target sebanyak 44 kawasan adalah 82 kawasan atau 186,36 %. Sedangkan dari 82 kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi tersebut terdapat 76 kawasan dinyatakan pulih dan 6 desa/kelurahan dinyatakan tidak pulih. Banyaknya wilayah yang mengalami keterpulihan disebabkan oleh penambahan kegiatan bimtek *life skill* yang dilaksanakan melalui sinergi kegiatan K/L, dana hibah pemerintah daerah serta CSR dunia usaha.

Status awal kawasan yang diintervensi dengan status Bahaya berjumlah 38 desa/kelurahan, status waspada berjumlah 41 desa/kelurahan, 3 desa/kelurahan dengan status awal siaga (hibah CSR dengan lokasi daerah penyangga) dan 3 (tiga) desa/kelurahan belum dilakukan monitoring dan evaluasi.

Grafik 3.6. Sebaran perubahan kawasan rawan narkoba T.A. 2024



Tabel 3.2.

Perubahan Status Kerawanan Narkoba T.A 2024

NO	PERUBAHAN STATUS KERAWANAN	JUMLAH
----	----------------------------	--------

	NARKOBA	
1	Bahaya Menjadi Waspada	1
2	Bahaya Menjadi Siaga	3
3	Bahaya Menjadi Aman	34
4	Waspada Menjadi Siaga	6
5	Waspada Menjadi Aman	32
6	Tidak Puli	6
	Jumlah	82

b. Capaian Kinerja Rincian Output

Berdasarkan hasil kegiatan pemberdayaan alternatif yang diselenggarakan secara nasional diketahui, sebagaimana tabel capaian kinerja (output) pemberdayaan alternatif 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Rincian OutPut T.A 2024

No	Rincian Output	Target	Capaian	%
1	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	16 Pok Masy	18 Pok Masy	112,50
2	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	28 Pok Masy	64 Pok Masy	228,57
3	Juknis Pemberdayaan Alternatif	1 Juknis	2 Juknis	200

Pada tahun 2024 target sebanyak 44 kawasan mendapatkan intervensi penyelenggaraan pemberdayaan alternatif sesuai dengan DIPA Awal yang disahkan pada bulan Desember 2023 yang terbagi dalam 3 Rincian Output (RO). Dalam pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rincian Output Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika (3248.BDD), terjadi over prestasi atas kinerja:

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Rincian OutPut T.A 2024

No	Satker	Desa	Desa/Kel	Jenis Pelatihan	Peserta	Ket
1	BNNP SUMATERA UTARA	1	Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dan Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan	Barista	15	
2	BNNP SUMATERA BARAT	2	Desa Balai Naras, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat	Pelatihan Seni Ukir Pelaminan	15	
3	BNNP SUMSEL	3	Desa Gasing, Kec. Tatang Kelapa, Kab. Banyuasin	Budidaya Jamur Tiram, Budidaya Ikan Lele	10	
		4	Kel. Sukarami Kec Sukarami, Kota Palembang	Bantuan Lele Pemda 2.500 bibit ikan lele		Bantuan Pemda
4	BNNP LAMPUNG	5	Desa Kibang, Kec. Metro Kibang, Kab. Lampung Timur	Kuliner Pembuatan Kripik Pisang dan Roti.	15	
5	BNNP RIAU	6	Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau	Pelatihan Pengolahan Hasil Laut	15	
6	BNNP KEPULAUAN RIAU	7	Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepri	Pengolahan Hasil Laut	15	
7	BNNP BENGKULU	8	Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu	Pengolahan Ikan	15	
8	BNNP DKI JAKARTA	9	Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta	Pelatihan kuliner	15	

			Barat			
9	BNNP JAWA TENGAH	10	Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov Jawa Tengah	Servis AC	15	
10	BNNP JAWA BARAT	11	Desa Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta	Pembuatan keripik singkong	15	
11	BNNP JAWA BARAT	12	Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab Pangandaran	Produksi Sandal Hotel	15	Hibah Pemda
12	BNNK SUKABUMI	13	Desa Cibolang. Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Pelatihan UMKM	15	Hibah Pemda
13	BNNP JAWA TIMUR	14	Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan	Service AC	15	
14	BNNP JAWA TIMUR	15	Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Budidaya Maggot BSF	15	Hibah Pemda
15	BNNK SIDOARJO	16	Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Pelatihan Pengecetan	30	CSR
16	BNNP KALBAR	17	Desa Suka harja, Kecamatan Delta Pawan, Kab Ketapang, Prov Kalimantan Barat	Aneka kuliner dan Kerajinan Pokok Telok	15	
			Kel. Dalam Bugis Pontianak, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Pelatihan Otomotif	30	CSR
		18	Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak			
		19	kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak			
		20	Desa Kapur. Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya			
		21	Kel. Sungai Pinyuh kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah			
		22	Kel. Roban Singkawang	Pelatihan Otomotif	30	CSR

		23	Kel. Condong Singkawang			
		24	Kel. Sedau Singkawang			
		25	Kel. Sungai Garam Hilir Singkawang			
		26	Desa Jagoi Bengkayang			
		27	Desa Pulau Lemukutan Bengkayang			
17	BNNP KALIMANTAN TENGAH	28	Kel. Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur	Pandai Besi	15	
18	BNNP KALIMANTAN SELATAN	29	Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Pelatihan Kuliner	15	
		30	Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	Pelatihan Kuliner	15	
19	BNNP SULAWESI UTARA	31	Kel. Airmadidi Atas, Kec Airmadidi, Kab.: Minahasa Utara, Prov Sulawesi Utara	Pelatihan Tata Rias	15	
20	BNNP SULTENG	32	Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi	Pelatihan Sablon	15	
21	BNNP SULSEL	33	Desa Panakkukang, Kec. Pallangga Kab Gowa Prov Sulsel	Pelatihan Percetakan	15	
22	BNNP SULTRA	34	Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara	Membuat aneka kue jajanan	15	
23	BNNP MALUKU UTARA	35	Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate	Pelatihan Hidroponik	15	
24	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	36	Desa Tanjung Kec.Tanjung Kab. Lombok Utara	Kuliner Jajanan dan Minuman Kekinian (Roti Gulung, Hamburger/ Hotdog, Kopi	15	

				Dalgona dan Teh Susu Cincau		
25	BNNP BALI	37	Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Pelatihan Kuliner	8	
		38	Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Pelatihan Kuliner	7	
26	BNNK BADUNG	39	Desa Mengwitani, Kec. Mengwi	Cake and Bakery	15	Hibah Pemda
		40	Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara	Cake and Bakery	15	Hibah Pemda
27	BNNP BANTEN	41	Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang	Pelatihan Barista	15	Hibah Pemda
28	BNNP BABEL	42	Desa Belo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat	Pengelolaan Hasil Perikanan	15	
		43	Desa Air Putih, Kec. Mentok Kab. Bangka Barat			
29	BNNP KALTIM	44	Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Pasir Utara,	Pelatihan Membatik	15	
30	BNNP MALUKU	45	Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kab. Ambon	Teknik Kendaraan Ringan	15	
31	BNNP GORONTALO	46	Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Pembuatan Kue	10	
		47	Desa Ayula Timur Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Pembuatan Kue	5	
32	BNNP PAPUA	48	Kel. Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura	Pembuatan Kerupuk Sagu	15	
33	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	49	Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang, Jawa Timur	Budidaya Lele	50	
		50	Kel. Pasir Gantung Kec. Tj. Karang Pusat,	Kuliner Cake	50	

	Bandar Lampung			
51	Kel. Bontorannu, Kec. Mariso, Sulawesi Selatan	Perbengkelan	45	
52	Kel. Buluh Kasap, Kec DumaiTimur, Kota Dumai, Riau	Barista	50	
53	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumut	Budidaya jahe merah dalam Polybag	50	Kolaborasi CSR
54	Kel Selat Tanjung Medan, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tj. Balai, Sumut	Olehan Ikan Kerang	50	
55	Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Sumut	Bakery dan Pastry	50	
56	Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Kepri	Barista Kopi dan pembuatan otak-otak	40	
57	Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumut	Papan Bunga Ucapan	40	
58	Desa Amis, Kec. Cikedung, Indramayu, Jabar	Budidaya Tebu	75	Kolaborasi CSR
59	Desa Tugu, Kec. Lelea, ndramayu, Jabar			
60	Desa Tunggul Payung, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar			
61	Desa Sungsang III, Kec. Banyuasin II Kab Banyuasin, Sumsel	Budidaya Lele	40	
62	Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Teknik Instalasi Listrik Dasar dan Teknik Pengelasan	20	
63	Kelurahan Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Teknik Instalasi Listrik Dasar dan Teknik Pengelasan	20	

		64	Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Kuliner olahan Ikan Bandeng	30	
					1190	

Jumlah pelatihan sebanyak 64 kali dengan jumlah peserta 1.190 Orang. Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dengan target 28 kelompok masyarakat telah tercapai 64 kelompok masyarakat dengan dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- Sebanyak 28 Desa/kelurahan yang diintervensi melalui DIPA
- Sebanyak 23 Desa/kelurahan yang diintervensi melalui Dana Hibah/CSR/Kolaborasi
- Sebanyak 13 Desa/Kelurahan yang diintervensi melalui optimalisasi kegiatan DIPA

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan Alternatif melalui Kolaborasi/Dana Hibah/CSR sebagai berikut:

- Implementasi Kerja Sama (PKS) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan PT. Pabrik Gula Rajawali II Cirebon, 75 orang dilatih budidaya tebu di Indramayu
- Kerjasama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan PT. Bintang Toedjoe membina 50 orang. Pelatihan Budidaya Jahe Merah menggunakan Polybag dan Pemasarannya di Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumut
- CSR dari PT Propan kerja sama dengan BNNK Sidoarjo. Pelatihan Pengecatan dengan peserta 21 orang di Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran.
- Pengelolaan Dana Hibah dari Pemprov Jawa Barat oleh BNNP Jawa Barat. Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Narkoba di Desa Sukatani, Kec Sukatani, Kab Purwakarta

- e. Pengelolaan Dana Hibah dari Pemkab Sukabumi oleh BNNK Sukabumi. Pelatihan UMKM dengan peserta 15 Orang di Desa Cibolang. Kec. Cisaat Kab. Sukabumi
- f. Pengelolaan Dana Hibah dari Pemprov Jawa Barat oleh BNNP Jawa Barat.
 - Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Narkoba di Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran.
 - Pelatihan Produksi Sandal Hotel dengan peserta 15 Orang di Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran.
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif di Desa Pangandaran, Kec Pangandaran, Kab. Pangandaran.
- g. Pengelolaan Dana Hibah dari Pemprov Jawa Timur oleh BNNP Jawa Timur. Pelatihan Budidaya Magot dengan peserta 15 orang di Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
- h. Bantuan kegiatan dari Dinas Pertanian Kota Palembang kepada Masyarakat Binaan BNNP Sumatera Selatan. Bantuan 2500 bibit ikan lele ke Masyarakat Binaan Pemberdayaan Alternatif di kel. sukarami Kec. Sukarami
- i. Kegiatan difasilitasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Pameran kegiatan P4GN
- j. Pengelolaan Dana Hibah dari Pemprov Banten oleh BNNP Banten. Pelatihan Barista Kopi dengan peserta 15 orang di Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang
- g. Kegiatan ini bersumber dari dana hibah Pemprov Kepri dan CSR (perusahaan dan Bank), berupa paket wirausaha Dunia Kopi. Bantuan gerobak beserta perlengkapan dan bahan utk 21 orang (7 kelompok) tiap kelompok anggotanya 1 TP PKK dan 2 org terdampak bisa pecandu atau keluarga/istri terpidana)

2) Rincian Output Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (3248.QDD), terjadi over prestasi atas kinerja:

N o	Satker	Des a	Desa/kel	JENIS PELATIHAN	PESERTA	Ket
1	BNNP ACEH	1	Desa Meunasah Baktrieng, Kec Barona Jaya, Aceh Besar	Budidaya Tanaman Hidroponik	30	
		2	Gampong Meurah Kec Seulimum, Kab Aceh Besar	Budidaya Cabai	30	
		3	Gampong Mureu Baro Kec Indrapuri Kab Aceh Besar	Budidaya Cabai	30	
2	BNN KAB. GAYO LUES	4	Desa Beranang, Kec. Kuta Panjang	Pupuk Bio Organik Padat dan Cair	15	
		5	Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren	Pembuatan Pakan Ikan	15	
		6	Desa Penosan Kec. Blangjerango	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	15	
		7	Desa Bukit Kec.	Pakan Ikan	15	

			Blangkajeren, Kab. Gayo Lues			
		8	Desa Pertik Kec. Pining Kab. Gayo Lues	pembuatan pakan ayam	15	Optimalisas i
3	BNN KAB. BIREUEN	9	Pase Kec. Juli Kab. Bireuen	Menjahit	15	
		10	Cot Bada Kec. Jeumpa Kab. Bireuen	Kuliner Kue	15	
		11	Seubok Meujim-jim Kec. Juli Kab. Bireuen	Kuliner Kue	15	
		12	Bale Me Kec. Kutablang Kab. Bireuen	Sabun Cair	15	
4	BNN KOTA LHOKSEUMAW E	13	Gampong Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utaarea	Pakan Ternak Unggas	25	
		14	Gampong Teupin Reusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Pakan Ternak Unggas	25	
		15	Gampong Blang Manyak Kec. Sawang Kab.	Pakan Ternak Unggas	25	

			Aceh Utara			
		16	Gampong Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Pakan Ternak Unggas	25	
5	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	17	Desa Jurong, Kec. Sawang, Aceh Utara, Aceh	Pasca Panen jagung dan pengolahan pakan unggas	50	
		18	Desa Pardomuan Kec Panyabungan Timur Kab Madina, Sumut	Kuliner Bahan Baku Gula Aren	50	Optimalisasi
				Jumlah	425	

Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dengan target 16 kelompok masyarakat tercapai 18 kelompok masyarakat yang diintervensi melalui optimalisasi anggaran dengan jumlah total masyarakat yang dilatih sebanyak 425 orang. Tidak hanya program Bimtek *Life skill* saja yang dilakukan, tetapi melalui program GDAD alih budidaya komoditi alternatif

Data Petani dan Luas Lahan Program GDAD di Aceh Tahun 2024

No	Satker	Kab/Kota	Lokus	Komoditas	Petani (org)	lahan (ha)
1	Dit. Dayatif	Aceh Utara	Desa Jurong Kec. Sawang	Jagung	43	15

2	BNNK Bireuen	Bireuen	Desa Paseh dan Geulumpang Meujim-jim Kec. Juli Kab Bireuen	Jagung	30	27
3	BNNP Aceh	Aceh Besar	Gampong Meurah Kec. Seulimeum.	Budidaya Cabe Merah	30	2
			Gampong Meunasah Bak Trieng, Kec. Kareung Barona Jaya	Budidaya Sayuran Hidroponik	30	
			Gampong Murue Baro, Kec. Indrapuri	Budidaya Cabe Merah	30	1,5
4	BNNK Gayo Lues	Gayo Lues	Blangjerango - Kutapanjang, Pantan Cuaca - Rikit Gaib, Blangkejeren, Blangpegayon - Dabun Gelang		195	937,7
	Total				358	983,2

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan GDAD melalui Kolaborasi/CSR terdiri dari:

- Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN kerja sama dengan Dinas pertanian Aceh Utara berupa bantuan Benih Jagung Pertiwi dan Bantuan Pupuk Urea 3 ton dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe dengan lokus di Desa Jurang Kec. Sawang pada Luas Lahan 15 Ha dengan jumlah petani 43 orang.
- PT. Ujang Jaya International dan Starbucks mendukung program GDAD BNN dalam pemberdayaan petani kopi, telah mengaudit (sertifikasi) lahan 937,7 Ha terdiri dari 1.007 petani yang difasilitasi BNNK Gayo Lues. Petani yang menerima pembibitan dari starbucks jumlah 183,1 ha terdiri dari 195 petani di wilayah Blangjerango - Kutapanjang, Pantan Cuaca - Rikit Gaib, Blangkejeren, Blangpegayon - Dabun Gelang
- BNNK Bireuen bekerja sama dengan Masyarakat secara swadaya (kemandirian) pada Desa Paseh dan Geulumpang Meujim-jim Kec. Juli Kab Bireuen dengan Luas Lahan 27 ha dengan petani sebanyak 30 orang.

Outcomes yang diterima dari program GDAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Panen Jagung di Desa Jurong, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara sebanyak Rata2 jumlah $6 \text{ ton} \times 15 \text{ Ha} = 90 \text{ Ton}$, Harga jual Rp. 4.600,- x 90.000 kg = Rp. 414.000.000,- (dlm 1 x masa panen), sehingga pendapatan per ha Rp. 414.000.000,- /15 ha = Rp. 27.600.000. Adapun pendapatan Per Petani Rp. 414.000.000,- /43 org = Rp 9.627.906,98,- /musim tanam
- b. Budidaya Cabe di Kabupaten Aceh Besar dengan luas Lahan Cabe 3,5 ha dengan hasil panen 3,6 ton (3.600 kg), Harga cabe per Kg Rp. 30.000,- sehingga Total hasil pendapatan kotor Rp. 30.000 x 972 kg = Rp. 29.160.000,-
- c. Budidaya Pakcoy di desa Meunasah Baktrieng (3 x panen) = 150 kg, 150 x Rp. 15.000 = Rp. 2.250.000,-
- d. Budidaya Jagung di Kabupaten Bireuen diperkirakan Panen pada bulan Februari 2025 Estimasi Panen $6 \text{ ton/ha} \times 27 \text{ ha} = 162 \text{ ton}$ (162.000 kg) dengan Harga Rp. 4.600,- x 162.000 kg = Rp. 745.200.000,- (dml 1 x masa panen). Sehingga Per ha = Rp. 745.200.000,- /27 ha = Rp. 17.330.232,55,- dan estimasi pendapatan per Petani = Rp. 745.200.000,- /30 org = Rp 24.840.000,- /musim tanam atau Rp. 6.210.000 per bulan
- e. Budidaya Kopi di Gayo Lues Pada Tahun 2024 penjualan Kopi ke PT. Ujang Jaya International sebanyak 210 Ton yang terdiri dari Penjualan pertama 60 ton (60.000 kg) x Rp. 94.000,-/kg = Rp. 5.640.000.000,-, Penjualan kedua 150 ton (150.000 kg) x Rp. 92.000,-/kg = Rp. 13.800.000.000,-, sehingga Total penjuala sebesar Rp. 19.440.000.000,-

- 3). Rincian Output Juknis Pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif (3248.AFA), sebagai target adalah Penyusunan Juknis Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi pada Kawasan Rawan Narkoba namun pelaksanaannya dapat terselesaikan 2 (dua) buah Juknis yaitu Juknis Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi pada Kawasan Rawan Narkoba dan Juknis Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Status keterpulihan kawasan rawan narkoba merupakan hasil pengukuran keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba. Suatu kawasan dikatakan

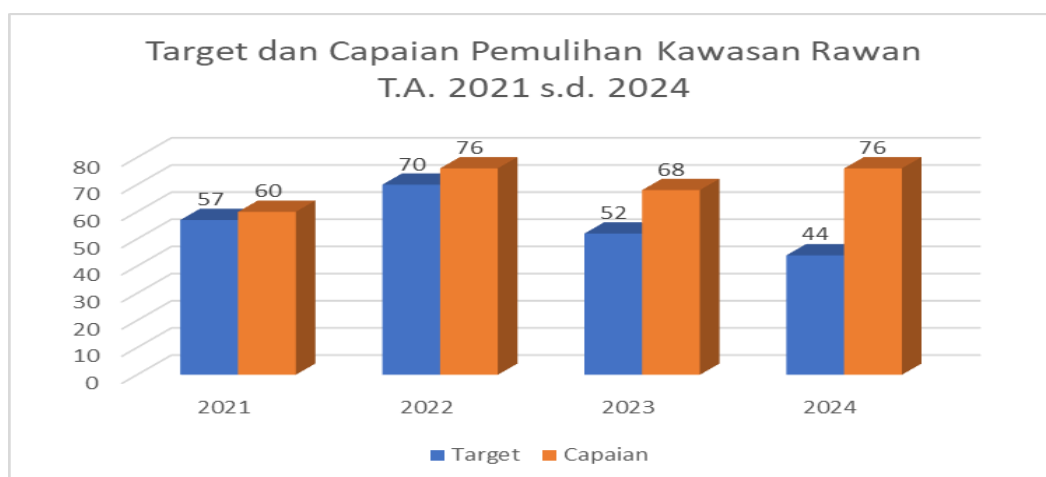
pulih bila kawasan tersebut dinyatakan pulih setelah dilakukan penanganan pada kawasan rawan narkoba tersebut. Penanganan kawasan rawan narkoba tersebut dilakukan melalui program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) mulai dari Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan dan Kerja Sama.

C. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah Nasional (Tahun 2021-2024) Direktorat Pemberdayaan Alternatif

a. Capaian Kinerja 4 Tahun terakhir (2021-2024)

Pada analisis dan evaluasi realisasi kinerja kegiatan Direktorat Pemberdayaan Alternatif pada 4 (empat) tahun terakhir (2021, 2022, 2023 dan 2024) tercatat capaian sebagai berikut:

Grafik. 3.7 Target dan Capaian Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 s.d. 2024



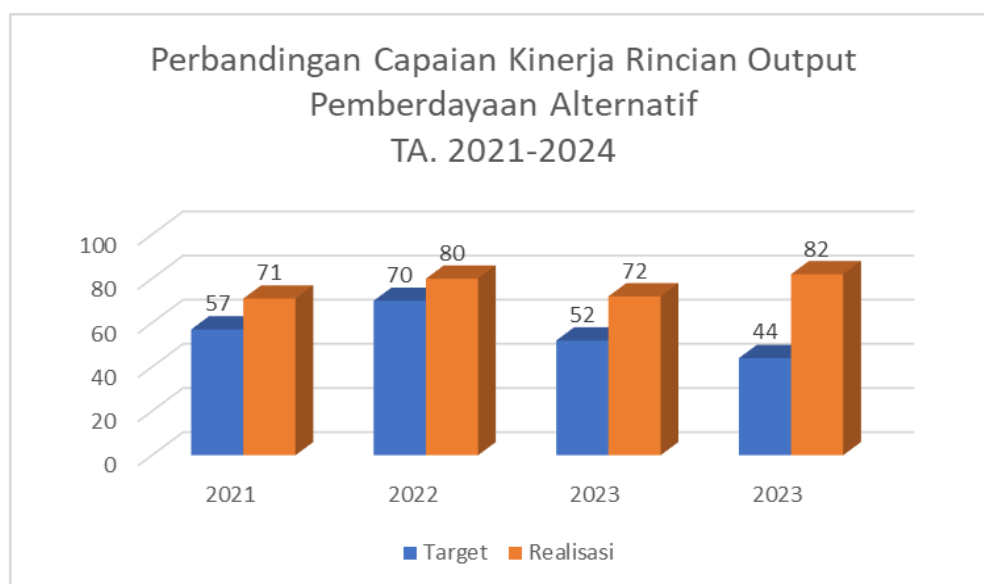
Capaian Kinerja selama 4 (empat) tahun (2021 s.d. 2024) dapat dijelaskan sebagai berikut: capaian untuk tahun 2021 adalah sebesar 105% dan ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 108%. Sejalan dengan tahun berikutnya, di tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 130% dan tahun 2024 meningkat pula sebesar 172,72 %. Kebijakan alokasi anggaran yang fluktuatif menyebabkan target kinerja yang tidak bisa meningkat setiap tahun namun dengan sinergi

stakeholder baik K/L, pemda maupun dunia usaha mampu meningkatkan capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun ini.

b. Capaian Kinerja Rincian Output 4 Tahun terakhir (2021-2024)

Pada analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Rincian Output Direktorat Pemberdayaan Alternatif pada 4 tahun terakhir (2021, 2022, 2023 dan 2024) tercatat capaian sebagai berikut:

Grafik. 3.8 Target dan Capaian Kinerja Rincian Output Pemberdayaan Alternatif TA. 2021-2024



Capaian dari target selama 4 tahun (2021-2024) dapat dijelaskan sebagai berikut: capaian dari target untuk tahun 2021 adalah sebesar 124,56% dan ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 114,28% sedangkan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 138,46%, sedangkan untuk tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 186,36%. Kebijakan alokasi anggaran yang fluktuatif menyebabkan target kinerja yang tidak bisa meningkat setiap tahun namun dengan sinergi *stakeholder* baik K/L, Pemda maupun Dunia Usaha mampu meningkatkan capaian kinerja selama 4 (empat) tahun.

c. Akuntabilitas Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

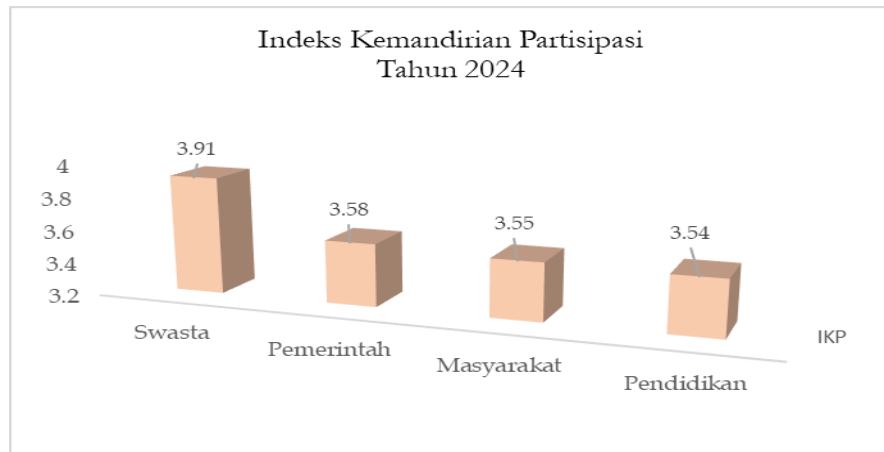
Target kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat tahun 2024 dengan sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, indikator kinerja kegiatan Indeks kemandirian partisipasi sebesar 3,3 dengan capaian sebesar 3.59 (108.79%).

Tabel 3.5. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,3 Indeks (kategori Mandiri)	3,59 Indeks (kategori sangat Mandiri)	108.79%

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diperoleh secara berurutan lingkungan swasta (3,91), lingkungan Pemerintah (3,58), dan lingkungan masyarakat (3,55) serta lingkungan pendidikan (3,54) yang secara kumulatif diperoleh IKP Nasional 3,59 dalam kategori A (sangat mandiri) dengan prosentase capaian 108.79%.

Grafik 3.9 Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2024

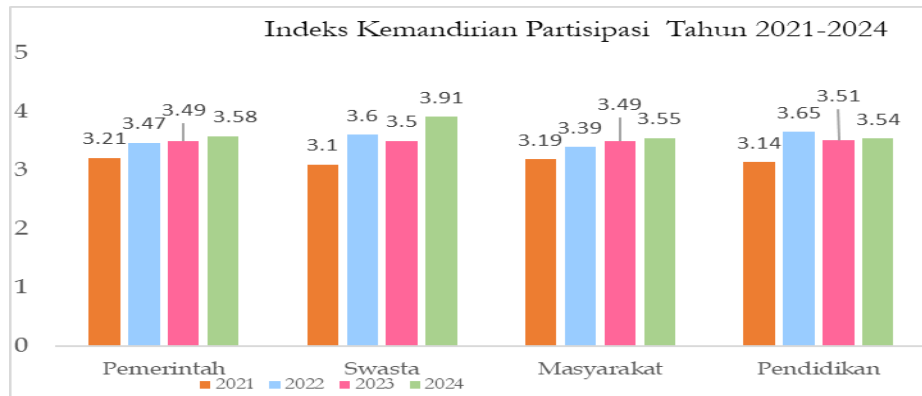


d. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah Nasional (Tahun 2021-2024) Direktorat Peran Serta Masyarakat

Kurun waktu 4 (empat) tahun 2021-2024 capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada lingkungan pemerintah meningkat tajam secara stabil sebesar 0.37(11.52%) dan lingkungan masyarakat sebesar 0.36(11.29%). Capaian pada lingkungan pemerintah dan masyarakat walaupun mengalami peningkatan secara kuantitas namun secara kualitas mengalami peningkatan yang artinya sistem tetap berkomitmen walaupun lingkungan belum optimal mendukung lingkungannya Bersih Narkoba.

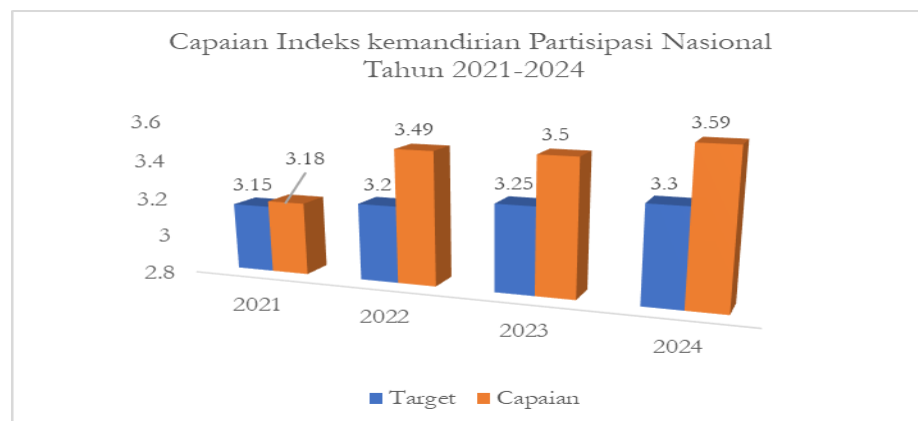
Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada lingkungan swasta walaupun mengalami dinamika fluktuatif namun meningkat tajam sebesar 0.81 (26.13%) dan pada lingkungan pendidikan 0.4(12.74%). Capaian pada lingkungan swasta dan masyarakat walaupun mengalami penurunan secara kuantitas namun secara kualitas mengalami peningkatan yang sangat tajam artinya sistem dan lingkungan berbanding lurus dengan komitmen partisipasi dalam mendukung lingkungannya Bersih Narkoba.

Grafik 3.10. Indeks kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2024



Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak terlalu signifikan sebesar 0.31 (9,7%) di tahun 2021- 2022, 0.01 (0,2%) di tahun 2022-2023 dan sebesar 0.09 (2,6 %) di tahun 2023-2024 yang secara kumulatif sebesar 0.41 (13,97%).

Grafik 3.11. Capaian Indeks kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2024



Capaian Indeks kemandirian Partisipasi secara nasional tahun 2024 dengan capaian 3.59 (2.57%), dan dalam kurun 4 (empat) tahun berselang (2021-2024) mengalami peningkatan dengan nilai prosentase kumulatif 0.41 (12.89%). Artinya dengan peningkatan 0.41 (12.89%) walaupun terlihat kecil namun memberikan dampak yang sangat massif hingga lingkungan terkecil di tiap-tiap wilayah seluruh Indonesia.

- e. **Informasi detail kinerja dan kualitas dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat**

Sejalan dengan Asta Cita diawal tahun kabinet kerja merah putih beberapa faktor yang mendukung suksesnya implementasi strategi ke deputian pemberdayaan masyarakat dalam mencapai target 113,33% tersebut antara lain:

- a. Penguatan sinergitas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam program P4GN serta mendorong partisipasi aktif komunitas masyarakat baik yang bergerak di lingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat, agama, babinkantibmas, PKK, dan komponen masyarakat lainnya, serta FGD dengan akademisi dalam membedah penanganan kampung narkoba, pembentukan Tim Terpadu Operasi Pesisir dan perbatasan.
- b. Penguatan dan sinergitas program kementerian/lembaga dalam membangun kekuatan intelijen sebagai salah satu upaya pendekatan *trust building* kepada masyarakat.
- c. Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan sebagai langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perbatasan

Hambatan dalam pencapaian target kinerja, yaitu terkait kualitas SDM dimana pengembangan kompetensi di internal BNN dalam proses implementasinya belum menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan profesionalitas yang seragam di kalangan pegawai, karena beragamnya latar belakang SDM baik pegawai yang berasal latar belakang instansi sipil maupun kepolisian. SDM yang berada di bawah satuan kerja BNNP dan BNNK belum memiliki kompetensi yang terstandar, disamping pengetahuan terkait wilayah kerja yang diemban. *Knowledge management* internal BNN masih rendah terutama pada lapisan yang bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Disamping itu, kuantitas SDM yang terbatas, namun harus mengontrol wilayah di daerah yang luas. Kondisi lain "*turnover*" yang tinggi akibat mutasi dan rotasi membutuhkan proses penyesuaian pada di tempat tugas baru.

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain adalah:

- 1) Penataan kembali SDM peta jabatan, pemerataan dan kompetensi, waktu pada posisi sebelumnya, serta penempatan SDM
- 2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan asistensi, perlu diperbaharui mekanisme asistensi (*re-design* asistensi), yang bertujuan penguatan sinergitas dan kolaborasi di bidang P4GN khususnya tematik dan ikonik
- 3) Peningkatan efektivitas aplikasi dan enumerator sebagai penunjang pencapaian akuntabilitas kinerja yang efektif, efisien.

f. Kinerja Anggaran

Kinerja Anggaran adalah hasil dari pelaksanaan anggaran yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, kinerja anggaran dapat diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dimana IKPA sebagai alat kontrol dalam melakukan Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Anggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran yang menghubungkan biaya dengan manfaat yang dihasilkan, manfaat tersebut dideskripsikan dalam target kinerja setiap unit kerja.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk menilai kinerja anggaran yang telah dibelanjakan, EKA dilakukan dengan menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). Beberapa aspek yang dinilai dalam EKA yaitu : penyerapan anggaran, konsistensi, pencapaian keluaran, efisiensi. Dengan adanya indikator kinerja, satuan kerja dapat menentukan tahapan dan besaran anggarannya.

No	Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi	%
1.	3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	9,369,231,000	9,114,739,146	97.28%
2.	3257 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	44,031,422,000	43,623,858,788	99.07%
	Total	53,400,653,000	52,738,597,934	98,76%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

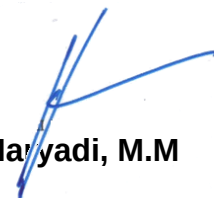
1. Capaian jumlah kab/kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun 2024 sebesar 170 kab/kota (113.33%) dari 173 kab/kota vertikal BNN yang terdiri dari 59 kab/kota (13.29%) berkategori sangat tanggap dengan nilai Indeks 3,25-3.91 (skala 4) dan 111 kab/kota (64.16%) berkategori Tanggap dengan nilai Indeks 2.65-3.24 (skala 4). IKOTAN Nasional dengan nilai indeks 3.11 (skala 4) atau 77.67 (skala 100) masuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B.
2. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif tahun 2024 yang telah ditetapkan berjumlah 44 kawasan dan berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 didapatkan bahwa realisasi kawasan yang berhasil dibina sebanyak 76 kawasan yang pulih.
3. Capaian Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang 18 Pokmas (112,50%) dari target 16 Pok Masy dan capaian Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba 64 kelompok masyarakat (228,57%) dari target 28 kelompok masyarakat
4. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) secara berurutan dari nilai tertinggi, sebagai berikut: lingkungan swasta 3.91 (sangat mandiri), lingkungan pemerintah 3.58 (sangat mandiri), lingkungan masyarakat 3.55 (sangat mandiri), dan lingkungan pendidikan 3.54 (sangat mandiri) yang secara kumulatif diperoleh IKP Nasional 3.59 dalam kategori A (sangat mandiri).
5. Capaian realisasi anggaran Direktorat Peran Serta Masyarakat sebesar 43,623,858,788 (99.07%) dari PAGU 44,031,422,000,-.
6. Capaian realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif sebesar 9,114,739,146 ,-(97.28%) dari PAGU 9,369,231,000,-

B. Rekomendasi

1. Pemerintah harus hadir dengan landasan hukum yang dapat diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden) sebagai payung hukum implementasi Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
2. Mendorong Pemerintah Daerah merumuskan tata Kelola pelaksanaan KOTAN dengan rencana aksi daerah tentang P4GN yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program intervensi secara holistik, integratif, dan berkelanjutan.
3. Penguatan sinergitas dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, swasta dan filantropi.
4. Optimalisasi peran penggiat yang didukung oleh organisasi masyarakat dengan lokus prioritas pada kawasan rawan di pesisir dan perbatasan.
5. Memperkuat pemetaan social dalam menentukan jenis pelatihan life skill yang akan diterima oleh masyarakat dan disesuaikan dengan peluang kerja atau wirausaha yang relevan dengan kondisi ekonomi setempat.
6. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha / perusahaan melalui program CSR, agar dapat menjadi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2025
Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN

Drs. Heri Maryadi, M.M



DOKUMENTASI

Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Prov Kepulauan Riau



Kel. Selumit Pantai, Kalimantan Utara



Kel. Selumit Pantai, Kalimantan Utara



Kp Beting, Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kalbar



Kp Beting, Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kalbar



WORKSHOP PENGGIAT P4GN





PEMBER
DAYAAN
MASYARAKAT
BAGI
PETANI
TEBU





PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI MASYARAKAT SELUMIT PANTAI





BIMTEK P46N
BAGI
MASYARAKAT
PESISIR DAN
PERBATASAN



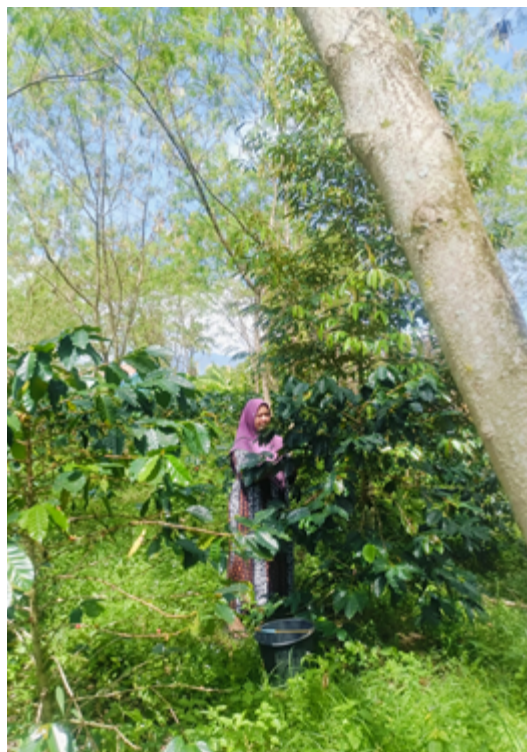
BIMTEK &
LIFESKILL
BARISTA,
KULINER,
OTOMOTIF,
ELEKTRONIK, &
PAPAN BUNGA





LIFE SKILL PENANAMAN KOMODITI JAGUNG







DETEKDI DINI MELLAUI TES URINE





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman
Narkoba Tahun 2024.

Jakarta, 23 November 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

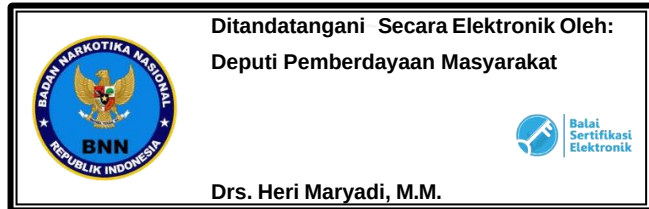
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN_NARKOBA TAHUN 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aceh	2.82	3.54	2.82	2.97	2.99	3.06	Tanggap	B
2.	Gayo Lues	3.48	3.63	3.23	3.35	3.47	3.46	Sangat Tanggap	A
3.	Aceh Selatan	2.99	3.66	3.19	3.47	3.53	3.38	Sangat Tanggap	A
4.	Pidie	2.88	3.59	3.27	3.19	2.91	3.18	Tanggap	B
5.	Pidie Jaya	2.93	3.54	2.65	2.73	2.60	2.96	Tanggap	B
6.	Aceh Tamiang	2.37	3.41	2.48	2.69	2.68	2.76	Tanggap	B
7.	Bireuen	2.71	3.47	2.66	2.90	2.93	2.98	Tanggap	B
8.	Kota Sabang	2.62	3.42	2.44	2.87	3.35	2.98	Tanggap	B
9.	Kota Lhokseumawe	2.55	3.49	2.62	2.90	2.78	2.91	Tanggap	B
10.	Kota Langsa	3.19	3.84	3.22	3.55	3.64	3.51	Sangat Tanggap	A
11.	Banda Aceh	2.83	3.55	2.70	2.85	2.89	3.01	Tanggap	B
12.	Sumatera Utara	2.94	3.51	2.90	3.07	3.06	3.13	Tanggap	B
13.	Mandailing Natal	2.70	3.44	2.54	2.70	2.65	2.86	Tanggap	B
14.	Deli Serdang	3.20	3.57	2.94	3.17	3.13	3.25	Tanggap	B
15.	Simalungun	2.78	3.50	2.79	3.20	3.42	3.16	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Serdang Bedagai	2.75	3.52	3.04	3.35	3.21	3.19	Tanggap	B
17.	Kota Pematang Siantar	2.46	3.32	2.35	2.52	2.52	2.69	Tanggap	B
18.	Kota Asahan	2.71	3.32	2.64	2.75	2.67	2.86	Tanggap	B
19.	Kota Tebing Tinggi	3.28	3.52	2.88	2.89	2.99	3.16	Tanggap	B
20.	Kota Tanjungbalai	3.19	3.74	2.96	3.59	3.60	3.46	Sangat Tanggap	A
21.	Tapanuli Selatan	2.94	3.41	3.33	3.24	3.19	3.21	Tanggap	B
22.	Kota Binjai	2.82	3.34	2.68	2.93	2.96	2.99	Tanggap	B
23.	Langkat	2.91	3.62	3.01	3.09	3.00	3.15	Tanggap	B
24.	Kota Gunung Sitoli	3.03	3.43	3.00	3.17	3.28	3.20	Tanggap	B
25.	Labuhan Batu Utara	3.53	3.60	3.18	3.33	3.44	3.45	Sangat Tanggap	A
26.	Karo	2.67	3.35	2.54	2.81	2.90	2.89	Tanggap	B
27.	Batu Bara	2.91	3.91	3.59	3.75	3.47	3.52	Sangat Tanggap	A
28.	Sumatera Barat	3.18	3.55	2.94	3.20	3.33	3.28	Sangat Tanggap	A
29.	Kota Payakumbuh	2.61	3.29	2.65	3.05	3.20	2.98	Tanggap	B
30.	Kota Sawahlunto	2.98	3.46	2.60	2.90	2.91	3.03	Tanggap	B
31.	Pasaman Barat	3.55	3.72	3.52	3.69	3.59	3.63	Sangat Tanggap	A
32.	Solok	3.66	3.73	2.96	3.16	3.63	3.48	Sangat Tanggap	A
33.	Sumatera Selatan	2.94	3.55	2.84	3.17	3.29	3.19	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Kota Pagar Alam	2.84	3.56	2.67	3.04	3.28	3.12	Tanggap	B
35.	Kota Lubuklinggau	2.69	3.21	2.45	2.72	3.26	2.89	Tanggap	B
36.	Prabumulih	3.71	3.88	3.37	3.60	3.45	3.65	Sangat Tanggap	A
37.	Ogan Ilir	2.26	3.49	2.55	3.18	3.67	3.04	Tanggap	B
38.	Ogan Komering Ilir	3.50	3.68	2.79	3.34	3.39	3.42	Sangat Tanggap	A
39.	Empat Lawang	3.21	3.36	3.25	3.34	3.28	3.29	Sangat Tanggap	A
40.	Muara Enim	3.00	3.66	3.01	3.04	3.13	3.19	Tanggap	B
41.	Musi Rawas	2.54	3.25	2.45	2.85	2.99	2.85	Tanggap	B
42.	Ogan Komering Ulu Timur	2.64	3.59	2.74	3.18	3.23	3.11	Tanggap	B
43.	Bengkulu	2.64	3.38	2.35	2.68	2.62	2.80	Tanggap	B
44.	Bengkulu Selatan	2.61	3.47	2.33	2.70	2.62	2.82	Tanggap	B
45.	Kota Bengkulu	2.66	3.29	2.38	2.65	2.62	2.78	Tanggap	B
46.	Jambi	2.67	3.51	2.70	3.01	2.97	3.01	Tanggap	B
47.	Batang Hari	2.76	3.60	2.96	3.26	3.19	3.18	Tanggap	B
48.	Tanjung Jabung Timur	2.60	3.46	2.64	2.84	2.78	2.91	Tanggap	B
49.	Kota Jambi	2.64	3.47	2.44	2.95	2.99	2.96	Tanggap	B
50.	Riau	2.92	3.57	2.90	3.09	3.38	3.19	Tanggap	B
51.	Kota Dumai	2.63	3.38	2.57	2.70	3.18	2.91	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Kota Pekanbaru	3.05	3.62	2.59	3.53	3.72	3.37	Sangat Tanggap	A
53.	Pelalawan	3.78	3.89	3.71	3.69	3.81	3.79	Sangat Tanggap	A
54.	Kuantan Singingi	2.44	3.47	2.79	2.69	3.00	2.88	Tanggap	B
55.	Kepulauan Riau	3.00	3.69	3.01	3.31	3.52	3.33	Sangat Tanggap	A
56.	Karimun	2.97	3.83	3.29	3.30	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
57.	Kota Batam	3.32	3.88	3.22	3.81	3.77	3.64	Sangat Tanggap	A
58.	Tanjung Pinang	2.79	3.38	2.58	2.84	3.29	3.00	Tanggap	B
59.	Bangka Belitung	2.96	3.54	2.96	3.20	3.23	3.21	Tanggap	B
60.	Bangka Selatan	3.15	3.54	2.82	3.01	3.15	3.18	Tanggap	B
61.	Bangka	3.16	3.59	3.39	3.43	3.47	3.40	Sangat Tanggap	A
62.	Kota Pangkalpinang	2.80	3.50	2.73	3.16	3.21	3.12	Tanggap	B
63.	Belitung	2.72	3.53	2.82	3.17	2.97	3.08	Tanggap	B
64.	Lampung	2.88	3.55	2.60	3.01	3.02	3.07	Tanggap	B
65.	Tanggamus	2.52	3.46	2.51	2.92	2.82	2.90	Tanggap	B
66.	Lampung Selatan	3.42	3.85	3.07	3.66	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
67.	Kota Metro	2.76	3.42	2.55	2.92	3.03	2.98	Tanggap	B
68.	Way Kanan	2.95	3.61	2.92	3.28	3.30	3.25	Tanggap	B
69.	Lampung Timur	2.78	3.48	2.23	2.60	2.60	2.83	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Banten	3.21	3.69	3.07	3.48	3.51	3.43	Sangat Tanggap	A
71.	Kota Tangerang Selatan	3.41	3.84	3.54	3.82	3.86	3.70	Sangat Tanggap	A
72.	Kota Cilegon	2.50	3.66	3.15	3.49	3.49	3.25	Sangat Tanggap	A
73.	Kota Tangerang	3.50	3.63	2.74	3.19	3.25	3.34	Sangat Tanggap	A
74.	DKI Jakarta	2.91	3.56	2.64	2.80	2.70	2.99	Tanggap	B
75.	Kota Jakarta Timur	2.68	3.58	2.49	2.64	2.46	2.84	Tanggap	B
76.	Kota Jakarta Selatan	3.31	3.59	2.88	2.79	2.79	3.13	Tanggap	B
77.	Kota Jakarta Utara	2.63	3.51	2.55	2.97	2.91	2.97	Tanggap	B
78.	Jawa Barat	2.76	3.51	2.58	2.91	2.89	2.99	Tanggap	B
79.	Karawang	2.72	3.46	2.27	2.48	2.51	2.77	Tanggap	B
80.	Sukabumi	2.69	3.35	2.35	2.60	2.58	2.78	Tanggap	B
81.	Bogor	2.62	3.30	2.38	2.80	2.69	2.82	Tanggap	B
82.	Sumedang	2.66	3.38	2.32	2.64	2.70	2.81	Tanggap	B
83.	Tasikmalaya	2.53	3.44	2.28	2.71	2.96	2.84	Tanggap	B
84.	Ciamis	2.70	3.39	2.20	2.66	2.58	2.79	Tanggap	B
85.	Kuningan	2.46	3.14	2.34	3.09	3.15	2.88	Tanggap	B
86.	Kota Cirebon	2.47	3.33	2.41	2.57	2.40	2.69	Tanggap	B
87.	Kota Depok	3.32	3.80	3.10	3.35	3.52	3.46	Sangat Tanggap	A

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	Cianjur	3.20	3.92	2.79	3.17	2.74	3.26	Sangat Tanggap	A
89.	Garut	3.00	3.82	3.21	3.68	3.83	3.52	Sangat Tanggap	A
90.	Kota Bandung	3.29	3.72	2.97	3.29	3.27	3.36	Sangat Tanggap	A
91.	Kota Cimahi	2.80	3.87	3.33	3.73	3.88	3.52	Sangat Tanggap	A
92.	Bandung Barat	2.73	3.43	2.35	2.66	2.63	2.83	Tanggap	B
93.	DI Yogyakarta	2.97	3.62	2.94	3.35	3.29	3.27	Sangat Tanggap	A
94.	Kota Yogyakarta	3.22	3.63	2.87	3.46	3.24	3.35	Sangat Tanggap	A
95.	Bantul	3.28	3.94	3.63	3.84	3.88	3.71	Sangat Tanggap	A
96.	Sleman	2.49	3.21	2.12	2.52	2.47	2.64	Cukup Tanggap	C
97.	Jawa Tengah	3.13	3.64	2.90	3.39	3.26	3.32	Sangat Tanggap	A
98.	Kendal	3.01	3.67	2.94	3.21	3.10	3.23	Tanggap	B
99.	Temanggung	3.19	3.67	3.23	3.54	3.14	3.40	Sangat Tanggap	A
100.	Banyumas	2.50	3.86	3.18	3.67	2.55	3.21	Tanggap	B
101.	Purbalingga	2.68	3.49	2.36	2.80	2.74	2.89	Tanggap	B
102.	Batang	3.17	3.15	2.71	3.40	3.67	3.25	Sangat Tanggap	A
103.	Cilacap	3.90	3.89	3.02	3.57	3.67	3.69	Sangat Tanggap	A
104.	Magelang	3.14	3.66	3.00	3.72	3.76	3.49	Sangat Tanggap	A
105.	Kota Surakarta	2.96	3.46	2.45	2.94	2.99	3.03	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Kota Tegal	3.66	3.91	3.40	3.87	3.86	3.78	Sangat Tanggap	A
107.	Jawa Timur	2.98	3.66	2.87	3.42	3.41	3.31	Sangat Tanggap	A
108.	Malang	3.07	3.80	3.11	3.62	3.54	3.46	Sangat Tanggap	A
109.	Tulungagung	3.28	3.72	3.05	3.46	3.65	3.47	Sangat Tanggap	A
110.	Pasuruan	3.42	3.93	3.20	3.81	3.99	3.71	Sangat Tanggap	A
111.	Sumenep	3.34	3.71	3.46	3.76	3.86	3.63	Sangat Tanggap	A
112.	Gresik	2.99	3.62	3.27	3.76	3.75	3.48	Sangat Tanggap	A
113.	Lumajang	3.25	3.86	3.20	3.41	3.54	3.48	Sangat Tanggap	A
114.	Kediri	2.69	3.48	2.26	3.11	2.99	2.99	Tanggap	B
115.	Tuban	2.72	3.51	2.27	2.85	2.93	2.94	Tanggap	B
116.	Kota Malang	2.56	3.29	2.44	2.96	2.70	2.85	Tanggap	B
117.	Kota Surabaya	3.06	3.65	2.88	3.35	3.51	3.33	Sangat Tanggap	A
118.	Kota Kediri	3.15	3.75	3.04	3.57	3.64	3.47	Sangat Tanggap	A
119.	Sidoarjo	2.53	3.82	2.67	3.55	3.38	3.25	Sangat Tanggap	A
120.	Kota Batu	2.47	3.30	2.41	3.07	3.03	2.91	Tanggap	B
121.	Trenggalek	3.28	3.88	3.30	3.80	3.75	3.63	Sangat Tanggap	A
122.	Nganjuk	2.62	3.66	2.69	3.59	3.62	3.28	Sangat Tanggap	A
123.	Kota Mojokerto	2.72	3.38	2.51	3.06	2.93	2.98	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.	Blitar	3.80	3.89	3.34	3.71	3.40	3.69	Sangat Tanggap	A
125.	Bali	2.90	3.52	2.63	2.94	2.89	3.04	Tanggap	B
126.	Badung	3.15	3.58	2.88	3.33	3.25	3.29	Sangat Tanggap	A
127.	Gianyar	2.69	3.53	2.38	2.67	2.52	2.84	Tanggap	B
128.	Klungkung	2.63	3.28	2.28	2.75	2.75	2.80	Tanggap	B
129.	Buleleng	3.64	3.78	3.52	3.75	3.89	3.73	Sangat Tanggap	A
130.	Karangasem	2.62	3.44	2.65	3.16	3.06	3.03	Tanggap	B
131.	Kota Denpasar	2.78	3.44	2.36	2.71	2.91	2.90	Tanggap	B
132.	Nusa Tenggara Timur	2.69	3.33	2.28	2.55	2.37	2.73	Tanggap	B
133.	Kota Kupang	2.74	3.41	2.21	2.65	2.48	2.79	Tanggap	B
134.	Belu	2.65	3.25	2.35	2.62	2.36	2.72	Tanggap	B
135.	Rote Ndao	2.67	3.32	2.30	2.40	2.26	2.67	Tanggap	B
136.	Nusa Tenggara Barat	2.96	3.58	2.93	3.16	3.17	3.19	Tanggap	B
137.	Sumbawa Barat	2.67	3.52	2.78	2.92	2.82	2.98	Tanggap	B
138.	Bima	2.97	3.55	2.99	3.14	3.09	3.18	Tanggap	B
139.	Mataram	3.89	3.91	3.31	3.81	3.91	3.82	Sangat Tanggap	A
140.	Sumbawa	2.47	3.36	2.66	2.83	2.92	2.87	Tanggap	B
141.	Kalimantan Selatan	2.96	3.51	2.91	3.21	3.21	3.19	Tanggap	B

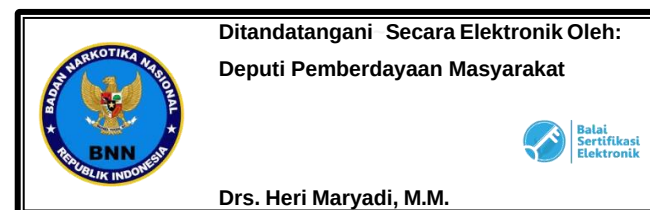
No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Barito Kuala	2.99	3.82	3.41	3.77	3.65	3.53	Sangat Tanggap	A
143.	Kota Banjarbaru	2.82	3.64	3.10	3.09	3.01	3.15	Tanggap	B
144.	Balangan	3.48	3.26	2.91	3.23	3.47	3.30	Sangat Tanggap	A
145.	Tanah Laut	3.11	3.59	3.06	3.49	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
146.	Tabalong	2.64	3.27	2.46	2.83	2.67	2.83	Tanggap	B
147.	Hulu Sungai Selatan	2.69	3.48	2.59	3.03	2.98	3.01	Tanggap	B
148.	Hulu Sungai Utara	3.48	3.45	3.25	3.52	3.83	3.51	Sangat Tanggap	A
149.	Kota Banjarmasin	2.73	3.53	2.59	3.00	2.94	3.02	Tanggap	B
150.	Kalimantan Barat	2.85	3.46	2.68	3.04	3.00	3.06	Tanggap	B
151.	Bengkayang	2.48	3.30	2.56	3.16	3.20	2.97	Tanggap	B
152.	Kubu Raya	3.32	3.70	3.11	3.65	3.61	3.52	Sangat Tanggap	A
153.	Sintang	3.21	3.52	2.75	3.00	2.67	3.11	Tanggap	B
154.	Sanggau	2.69	3.41	2.50	2.70	2.69	2.85	Tanggap	B
155.	Kota Singkawang	2.93	3.45	2.67	2.78	2.66	2.96	Tanggap	B
156.	Kota Pontianak	2.65	3.51	2.73	3.20	3.32	3.11	Tanggap	B
157.	Mempawah	2.74	3.43	2.49	2.92	2.95	2.96	Tanggap	B
158.	Kalimantan Timur	2.60	3.42	2.69	2.95	2.79	2.93	Tanggap	B
159.	Samarinda	2.68	3.54	2.79	3.28	3.17	3.13	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Balikpapan	2.77	3.42	2.70	3.15	2.93	3.04	Tanggap	B
161.	Bontang	2.46	3.36	2.60	2.66	2.50	2.76	Tanggap	B
162.	Kalimantan Tengah	2.89	3.46	2.87	3.43	3.48	3.25	Sangat Tanggap	A
163.	Kota Waringin Barat	3.98	3.93	3.63	3.88	3.98	3.91	Sangat Tanggap	A
164.	Kota Palangka Raya	2.32	3.10	2.32	2.98	2.99	2.78	Tanggap	B
165.	Kalimantan Utara	2.63	3.32	2.61	2.72	2.80	2.85	Tanggap	B
166.	Kota Tarakan	2.65	3.21	2.56	2.86	2.88	2.87	Tanggap	B
167.	Nunukan	2.60	3.47	2.67	2.60	2.73	2.84	Tanggap	B
168.	Sulawesi Selatan	2.94	3.66	3.08	3.46	3.55	3.36	Sangat Tanggap	A
169.	Tana Toraja	2.70	3.54	2.74	3.30	3.42	3.17	Tanggap	B
170.	Bone	2.82	3.95	3.43	3.71	3.79	3.53	Sangat Tanggap	A
171.	Kota Palopo	3.29	3.48	3.05	3.35	3.44	3.35	Sangat Tanggap	A
172.	Sulawesi Tengah	2.66	3.39	2.66	2.78	2.77	2.89	Tanggap	B
173.	Banggai Kepulauan	3.05	3.55	2.89	3.09	3.14	3.18	Tanggap	B
174.	Poso	2.81	3.48	2.72	2.85	3.03	3.01	Tanggap	B
175.	Tojo Una-Una	2.63	3.42	2.63	2.73	2.59	2.85	Tanggap	B
176.	Kota Palu	2.34	3.24	2.41	2.88	2.67	2.75	Tanggap	B
177.	Morowali	2.62	3.34	2.66	2.50	2.54	2.76	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178.	Donggala	2.58	3.39	2.67	3.23	3.08	3.03	Tanggap	B
179.	Sulawesi Tenggara	2.68	3.48	2.64	3.10	3.10	3.04	Tanggap	B
180.	Muna	2.47	3.08	2.16	2.46	2.51	2.59	Cukup Tanggap	C
181.	Kolaka	2.44	3.38	2.64	3.01	2.91	2.91	Tanggap	B
182.	Kota Kendari	2.82	3.58	2.66	3.24	3.26	3.17	Tanggap	B
183.	Kota Bau-Bau	3.10	3.77	2.93	3.44	3.46	3.39	Sangat Tanggap	A
184.	Gorontalo	2.84	3.52	2.75	2.97	2.90	3.04	Tanggap	B
185.	Boalemo	2.70	3.42	2.68	2.89	2.70	2.92	Tanggap	B
186.	Bone Bolango	2.56	3.46	2.44	2.59	2.66	2.80	Tanggap	B
187.	Kota Gorontalo	2.73	3.48	2.72	2.90	2.79	2.97	Tanggap	B
188.	Gorontalo Utara	3.35	3.83	3.21	3.72	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
189.	Gorontalo	2.79	3.41	2.62	2.90	2.80	2.96	Tanggap	B
190.	Maluku	3.31	3.67	3.08	3.34	3.17	3.36	Sangat Tanggap	A
191.	Buru Selatan	2.81	3.43	2.65	2.80	2.63	2.92	Tanggap	B
192.	Kota Tual	3.85	3.92	3.48	3.84	3.68	3.80	Sangat Tanggap	A
193.	Maluku Utara	2.74	3.46	2.76	2.65	2.56	2.87	Tanggap	B
194.	Pulau Morotai	2.98	3.24	2.35	2.32	2.02	2.67	Tanggap	B
195.	Halmahera Utara	2.66	3.54	2.99	3.28	3.44	3.19	Tanggap	B
196.	Kota Tidore	2.72	3.49	2.75	2.45	2.33	2.79	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepulauan								
197.	Papua	2.74	3.35	2.72	2.97	3.14	3.01	Tanggap	B
198.	Jayapura	3.11	3.46	2.89	3.12	3.22	3.20	Tanggap	B
199.	Mimika	2.25	3.21	2.49	2.79	3.05	2.77	Tanggap	B
200.	Sulawesi Barat	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
201.	Poliwali Mandar	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
202.	Sulawesi Utara	2.62	3.52	2.75	2.82	2.67	2.91	Tanggap	B
203.	Kepulauan Sangihe	2.80	3.99	3.62	3.80	3.28	3.50	Sangat Tanggap	A
204.	Bolaang Mongondow	2.77	3.51	2.64	2.55	2.47	2.84	Tanggap	B
205.	Kota Bitung	2.61	3.37	2.45	2.59	2.62	2.78	Tanggap	B
206.	Kota Manado	2.34	3.26	2.38	2.47	2.41	2.62	Cukup Tanggap	C
207.	Papua Barat	2.43	3.17	2.35	2.47	2.43	2.62	Cukup Tanggap	C
Rata-rata Nasional		2.88	3.53	2.78	3.07	3.06	3.11	Tanggap	B

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

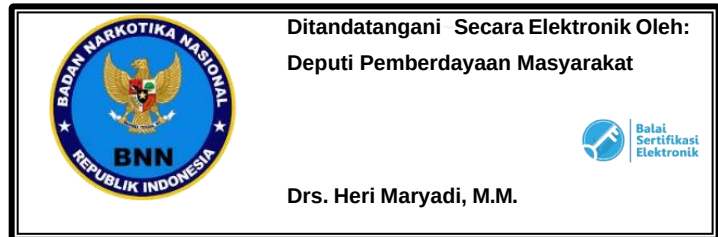
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAHI	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANJAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

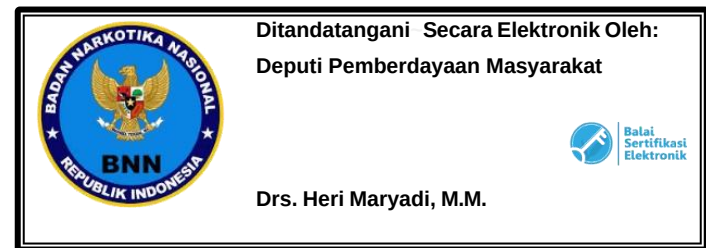
NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 6 Lembar
Perihal : Hasil Pengukuran IKRN di Wilayah
Program Pemberdayaan Alternatif

Jakarta, 03 Januari 2025

Kepada

Yth. **Kepala BNN Provinsi**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Program Kerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN T.A. 2024.

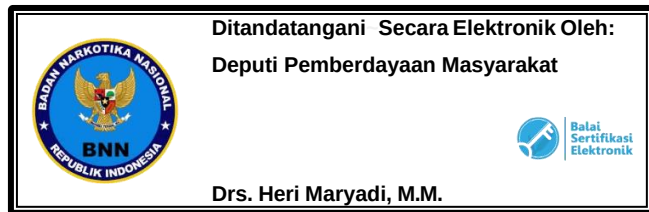
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) tahun 2024 melalui jajarannya P2M BNN Provinsi dan BNNK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKRN terlampir dengan masing-masing wilayah yang diintervensi program pemberdayaan alternatif BNNP dan BNNK, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Alternatif di tahun selanjutnya.

/4. Demikian ...

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN IKRN DI WILAYAH PROGRAM
PEMBERDAYAAN ALTERNATIF TAHUN 2024

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
1	BNNP Aceh	Desa Meunasah Baktrieng, Kec Barona Jaya, Aceh Besar	Waspada	3.45	Aman
		Gampong Meurah Kec Seulimum, Kab Aceh Besar	Bahaya	3.54	Aman
		Gampong Mureu Baro Kec Indrapuri Kab Aceh Besar	Bahaya	3.70	Aman
2	BNNK Gayo Lues	Desa Beranang, Kec. Kuta Panjang	Waspada	3.43	Aman
		Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren	Waspada	3.66	Aman
		Desa Penosan Kec. Blangjerango	Waspada	3.71	Aman
		Desa Bukit Kec. Blangkajeren, Kab. Gayo Lues	Waspada	3.29	Aman
		Desa Pertik Kec. Pining Kab. Gayo Lues	Waspada	3.80	Aman
3	BNNK Lhokseumawe	Gampong Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.18	Siaga
		Gampong Teupin Reusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.54	Aman
		Gampong Blang Banyak Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.85	Siaga
		Gampong Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.76	Siaga
4	BNNK Bireuen	Pase Kec. Juli Kab. Bireuen	Waspada	3.18	Siaga
		Cot Bada Kec. Jeumpa Kab. Bireuen	Waspada	3.54	Aman
		Seubok Meujim-jim Kec. Juli Kab. Bireuen	Waspada	3.85	Siaga

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Bale Me Kec. Kutablang Kab. Bireuen	Waspada	3.76	Siaga
5	BNNP Sumatera Utara	Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan	Bahaya	3.64	Aman
		Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan	Bahaya	3.38	Siaga
6	BNNP Sumatera Barat	Desa Balai Naras, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat	Bahaya	3.66	Siaga
7	BNNP Sumatera Selatan	Desa Gasing, Kec. Tatang Kelapa, Kab. Banyuasin	Bahaya	3.73	Siaga
		Kel. Sukarami Kec Sukarami, Kota Palembang	Waspada	3.76	Siaga
8	BNNP Lampung	Desa Kibang, Kec. Metro Kibang, Kab. Lampung Timur	Bahaya	3.47	Aman
9	BNNP Riau	Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau	Bahaya	3.87	Aman
10	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepri	Bahaya	3.39	Siaga
11	BNNP Bengkulu	Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu	Waspada	3.52	Aman
12	BNNP DKI Jakarta	Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	Bahaya	3.80	Aman
13	BNNP Jawa Tengah	Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov Jawa Tengah	Bahaya	3.58	Siaga
14	BNNP Jawa Barat	Desa Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta	Bahaya	3.74	Aman

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab Pangandaran	Waspada	3.76	Aman
15	BNNK Sukabumi	Desa Cibolang. Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Bahaya	3.29	Siaga
16	BNNP Jawa Timur	Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan	Bahaya	3.67	Aman
		Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Waspada	3.66	Aman
17	BNNK Sidoarjo	Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Waspada	2.96	Waspada
18	BNNP Kalimantan Barat	Desa Suka harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov Kalimantan Barat	Bahaya	3.37	Aman
		Kel. Dalam Bugis Pontianak, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Bahaya	3.28	Aman
		Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Siaga	3.50	Aman
		kel. Sungai Beliuang Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	Waspada	3.40	Aman
		Desa Kapur. Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	Bahaya	3.58	Aman
		Kel. Sungai Pinyuh kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	Siaga	3.71	Siaga
		Kel. Roban Singkawang	Bahaya	4.17	Aman
		Kel. Condong Singkawang	Waspada	3.66	Aman
		Kel. Sedau Singkawang	Bahaya	3.26	Aman
		Kel. Sungai Garam Hilir Singkawang	Siaga	3.58	Siaga
		Desa Jagoi Bengkayang	Bahaya	3.45	Aman
		Desa Pulau Lemukutan Bengkayang	Bahaya	2.79	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
19	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur	Bahaya	3.78	Aman
20	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Bahaya	3.47	Aman
		Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	Bahaya	3.47	Aman
21	BNNP Sulawesi Utara	Kel. Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Prov Sulawesi Utara	Bahaya	3.29	Aman
22	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi	Bahaya	3.58	Siaga
23	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Panakkukang, Kec. Pallangga Kab Gowa Prov Sulsel	Waspada	3.44	Siaga
24	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara	Waspada	3.63	Siaga
25	BNNP Maluku Utara	Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate	Waspada	3.58	Siaga
26	BNNP Nusa Tenggara Barat	Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara	Waspada	3.38	Aman
27	BNNP Bali	Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Waspada	-	-
		Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Waspada	-	-
28	BNNK Badung	Desa Mengwitani, Kec. Mengwi	Waspada	3.55	Aman
		Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara	Waspada	3.65	Aman
29	BNNP Banten	Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang	Waspada	3.70	Siaga
30	BNNP Bangka Belitung	Desa Belo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat	Waspada	3.48	Aman
		Desa Air Putih, Kec. Mentok Kab. Bangka Barat	Waspada	2.86	Waspada
31	BNNP Kalimantan Timur	Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Pasir Utara,	Bahaya	3.70	Siaga
32	BNNP Maluku	Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kab. Ambon	Waspada	-	-
33	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Waspada	3.58	Aman

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Ayula Timur Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Waspada	3.53	Aman
34	BNNP Papua	Kel. Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura	Waspada	3.41	Aman
35	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang, Jawa Timur	Bahaya	3.68	Aman
		Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	Bahaya	3.20	Siaga
		Kel. Bontorannu, Kec. Mariso, Sulawesi Selatan	Waspada	3.14	Siaga
		Kel. Buluh Kasap, Kec Dumai Timur, Kota Dumai, Riau	Bahaya	3.27	Aman
		Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumut	Bahaya	3.38	Siaga
		Kel Selat Tanjung Medan, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumut	Bahaya	3.26	Aman
		Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Sumut	Bahaya	3.65	Aman
		Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Kepri	Bahaya	3.48	Siaga
		Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumut	Waspada	3.42	Aman
		Desa Amis, Kec. Cikedung, Indramayu, Jabar	Bahaya	2.31	Waspada

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Tugu, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Bahaya	3.69	Aman
		Desa Tunggul Payung, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Bahaya	3.50	Siaga
		Desa Sungsang III, Kec. Banyuasin II Kab Banyuasin, Sumsel	Waspada	3.47	Aman
		Desa Jurong, Kec. Sawang, Aceh Utara, Aceh	Waspada	3.63	Siaga
		Desa Pardomuan Kec Panyabungan Timur Kab Madina, Sumut	Bahaya	3.10	Siaga
		Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Bahaya	3.28	Aman
		Kelurahan Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Bahaya	3.37	Aman
		Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Waspada	2.89	Siaga

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

